

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA TANAP  
KECAMATAN KEMBAYAN KABUPATEN SANGGAU**

Oleh:

Vinsensius Roni<sup>1\*</sup>

NIM.E1013161026

Dedi Kusnadi<sup>2\*</sup> Arifin<sup>3\*</sup>

\*Email: [vinsensiusroni@student.untan.ac.id](mailto:vinsensiusroni@student.untan.ac.id)

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

**ABSTRAK**

Penelitian implementasi kebijakan dana desa di Desa Tanap ini bertujuan untuk meneliti mengenai implementasi kebijakan dana desa yang dilakukan Pemerintah Desa Tanap terutama faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Dana Desa. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini memuat faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan dana desa di Desa Tanap kemudian didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan dana desa Tanap yaitu ada empat faktor. Faktor-faktornya adalah (1) faktor komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Saran yang dapat disampaikan yaitu diharapkan dana desa di Desa Tanap dapat dimanfaatkan lebih maksimal oleh Pemerintah Desa Tanap serta dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat desa, serta penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan untuk peneliti selanjutnya dalam kajian ilmu administrasi publik khususnya mengenai kebijakan dana desa.

**Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Dana Desa**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Dana desa diberikan sebagai bantuan atau dorongan dalam membiayai program pembangunan desa yang ditunjang partisipasi masyarakat desa sendiri demi meningkatkan pemerataan pembangunan desa dan kesejahteraan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam pengimplementasian pengelolaan dana desa masih sering mengalami banyak permasalahan. Dana desa harus dikelola secara tertib, efektif, transparan, bertanggungjawab, dan taat pada ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pengelolaan dana desa dilakukan oleh pemerintah desa. Pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Disebutkan juga pada Pasal 26 dalam melaksanakan tugas kepala desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, dan masih banyak lagi kewenangan lainnya.

Pemerintah desa yaitu kepala desa dan seluruh pemangku kepentingan di desa harus menjalin kerja sama dan koordinasi serta komunikasi yang baik. Dengan adanya dana desa yang merupakan kebijakan bagi desa itu sendiri, banyak kalangan yang meragukan keberhasilan dari kebijakan ini apabila aparat pemerintah desa itu sendiri tidak siap serta tidak memiliki disposisi dan sumber daya yang baik. Hal ini juga didukung dengan adanya teori George C. Edwards III (Subarsono, 2005:90) yaitu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Salah satu desa yang mendapatkan bantuan berupa dana desa adalah Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. Perkembangan pembangunan di Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau pada tahun 2020 jauh lebih lambat dan belum optimal terutama dalam akses pelayanan publik seperti masih adanya pembangunan jalan yang belum merata, sebagian dusun belum dilaksanakan proses pembangunan atau perbaikan jalan yang rusak serta pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai, dan belum sepenuhnya pengelolaan Dana Desa (DD) dalam

pembangunan fisik desa sesuai dengan keinginan masyarakat.

Masalah komunikasi di Pemerintah Desa Tanap diteliti untuk mengetahui kelancaran aparat desa dalam mengkomunikasikan adanya dana desa dan pemanfaatannya. Masalah sumber daya yang diteliti, dalam hal ini sumber daya manusia menjadi faktor yang mempengaruhi terhadap kebijakan, faktornya tidak hanya masyarakat namun aparat desanya juga beserta jumlah masyarakatnya yang terbatas dan belum siap untuk menjalani implementasi kebijakan dana desa. Masalah disposisi, implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Kemudian masalah struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating procedures* atau SOP).

Dilakukannya penelitian implementasi kebijakan dana desa di Desa Tanap ini agar peneliti mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa maupun pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa. di Desa Tanap oleh Pemerintah Desa Tanap. Peneliti sangat tertarik meneliti dikarenakan ingin mengetahui ketepatan pengimplementasian kebijakan dana desa di Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau.

## **2. Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian identifikasi masalah penelitian ini adalah rendahnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan sistem birokrasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dana desa di Pemerintahan Desa Tanap, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau.

## **3. Fokus Penelitian**

Ruang lingkup atau fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dana desa di Desa Tanap. Tempat dilakukan penelitian ini adalah Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau.

## **4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana komunikasi dilihat dari aspek transmisi, konsistensi, dan kejelasan dalam pengimplementasian kebijakan Dana Desa di Desa Tanap,

Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau?

- 2) Bagaimana sumber daya dilihat dari aspek sumber daya staf, informasi, wewenang, keuangan dan perlengkapan/fasilitas dalam pengimplementasian kebijakan Dana Desa di Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau?
- 3) Bagaimana disposisi atau sikap pelaksana dalam pengimplementasian kebijakan Dana Desa di Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau?
- 4) Bagaimana struktur birokrasi dalam pengimplementasian kebijakan Dana Desa di Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau?

### 5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor komunikasi dilihat dari aspek transmisi, konsistensi, dan kejelasan dalam pengimplementasian kebijakan Dana Desa di Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor sumber daya dilihat dari aspek sumber daya staf, informasi, wewenang, keuangan dan perlengkapan/fasilitas dalam pengimplementasian kebijakan

Dana Desa di Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau.

- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor disposisi atau sikap pelaksana dalam pengimplementasian kebijakan Dana Desa di Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau.
- 4) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor struktur birokrasi dalam pengimplementasian kebijakan Dana Desa di Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau.

### 6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki berbagai macam manfaat. Adapun manfaat- manfaat itu dapat dibagi ke dalam 2 kategori, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### a. Manfaat Teoritis

Secara akademik, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi, referensi, dan kontribusi bagi kalangan akademisi dan sebagai pengembangan ilmu administrasi publik terkait implementasi kebijakan dana desa serta membantu pemerintah mengawal prosesnya berjalan sebagaimana mestinya.

#### b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat menjadi bahan masukan dan informasi bagi pemerintah dalam upaya menemukan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan pemerintah desa, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, sehingga dapat

menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan perumusan berbagai kebijakan yang terkait dengan pembangunan desa.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konsep Impelentasi Kebijakan

Hakikat utama impelementasi adalah pemahaman mengenai apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan. Impelementasi secara sederhana bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005:65) menjelaskan bahwa:

“makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan- kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman- pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Syukur dalam Surmayadi (2005:79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.

2) Target grup yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.

3) Unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Michael Howlet dan M. Ramesh sebagaimana dikutip Subarsono (2009:13) menyatakan proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

a. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.

b. Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan pilihan-pilihan oleh pemerintah.

c. Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan.

d. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.

e. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.

### 2. Teori George C. Edwards III

Menurut teori George C. Edwards III (Subarsono, 2005:90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu:

### 1) Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses menjalankan suatu kebijakan, dengan komunikasi yang baik maka suatu kebijakan juga akan diterima oleh pelaku kebijakan secara benar tanpa adanya ambiguitas dalam memaknai kebijakan tersebut.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak

hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

c. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

### 2). Sumber daya

Sumber daya merupakan unsur yang terdiri atas sumber daya manusia dan sumber daya non manusia, yang secara nyata dan potensial dapat digunakan untuk meningkatkan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan itu sendiri. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia (staf), sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

#### a. Sumber daya Manusia (Staf)

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010: 98) menyatakan bahwa: *“probably the most essential resources in implementing policy is staff”*. Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan: *“no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to*

*do an effective job, implementing will not effective”*.

Staf adalah sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang ketua yang saling bekerjasama antara yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan baik oleh organisasi itu sendiri ataupun suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan yang berada di atas organisasi tersebut.

#### b. Sumber daya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya: *“budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”*.

Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

#### c. Sumber daya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010: 102) menyatakan bahwa sumber daya peralatan merupakan sarana yang

digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

#### d. Sumber daya Kewenangan

Sumber daya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010: 103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

### 3). Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010: 104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

Edward III dalam Widodo (2010: 104-105) mengatakan bahwa: jika

implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006: 159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi

tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

#### 4). Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi". Menurut Winarno

(2005:150), "Standard Operational Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi"

Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif". Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa: demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan di antara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

### 3. Sumber dan Arah Kebijakan Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Ada pun sumber pendapatan dana desa adalah sebagai berikut:

- 1) Dana yang bersumber dari APBN
- 2) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kabupaten/kota
- 3) Alokasi dana desa dari kabupaten/kota
- 4) Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota
- 5) Hibah dan sumbangan pihak ke tiga, serta
- 6) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 19 Tahun 2017, prioritas dana desa digunakan untuk:

#### 1) Pembangunan Desa

Diarahkan untuk pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seperti:

- a. Desa;
- b. Sosial pelayanan dasar;

- c. Usaha ekonomi desa; dan
  - d. Lingkungan hidup dan lainnya
- 2) Pemberdayaan masyarakat desa

Diarahkan untuk:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan desa;
- b. Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa;
- c. Pengembangan sistem informasi desa;
- d. Mendukung permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif;
- e. Mendukung pengelolaan usaha ekonomi;
- f. Mendukung pengelolaan pelestarian lingkungan hidup; dan g. Pengembangan menghadapi bencana alam dan lainnya.

#### 4. Prinsip-Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 3 menyebutkan tentang prioritas penggunaan dana desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip:

- 1). Keadilan: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- 2). Kebutuhan prioritas: mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan

- langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- 3). Terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada tiga sampai dengan lima jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan prioritas nasional, daerah propinsi, daerah kabupaten/kota, dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana desa yang dibagi rata;
  - 4). Kewenangan desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
  - 5). Partisipatif: mengutamakan prakarsa, kreatifitas, dan peran serta masyarakat desa;
  - 6). Swakelola: mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa;
  - 7). Berdikari: mengutamakan pemanfaatan dana desa dengan mendayagunakan sumber daya desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat desa sehingga dana desa berputar secara berkelanjutan di wilayah desa dan/atau daerah kabupaten/kota;
  - 8). Berbasis sumber daya desa: mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana desa; serta

- 9). Tipologi desa: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang kas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau” menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif adalah:

“metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.”

Dilakukan penelitian menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan pada penelitian ini lebih mengarah kepada fenomena dan situasi yang terjadi di lapangan tentang Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Tanap. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian

tanpa suatu interpretasi ilmiah. Sehingga, penelitian ini akan banyak memperoleh informasi melalui teknik wawancara dengan informan.

## 2. Langkah-Langkah Penelitian

Demi tercapainya tujuan dari suatu penelitian, penulis harus menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan mulai dari awal hingga akhir penelitian. Langkah-langkah penelitian ini disusun agar dalam penulisan usulan penelitian, sistematika penulisannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Sukardi (2014: 158- 159) menyebutkan langkah-langkah penelitian deskriptif adalah sebagai berikut.

- 1) Mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.
- 2) Membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas.
- 3) Menentukan tujuan dan manfaat penelitian.
- 4) Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan.
- 5) Menentukan kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian dan atau hipotesis penelitian.
- 6) Mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk dalam hal ini menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrumen pengumpul data, dan menganalisis data.

7) Mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistika yang relevan.

8) Membuat laporan penelitian.

## 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian yaitu di Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. Penelitian dilakukan di Kantor Pemerintah Desa Tanap bersama Kepala Desa Tanap dan Sekretaris Desa Tanap dan bersama beberapa warga Desa Tanap.

## 4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sasaran yang dituju untuk diteliti oleh penulis. Sehingga, dapat ditentukan informan yang menjadi subjek penelitian, yaitu Pemerintah Desa Tanap yaitu Kepala Desa Tanap dan Sekretaris Desa Tanap.

Objek penelitian adalah sesuatu yang ingin diteliti oleh penulis. Adapun objek penelitian dalam penulisan ini adalah faktor-faktor di dalam pengimplementasian kebijakan Dana Desa (DD) di Desa Tanap yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan sistem birokrasi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016: 224) “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”.

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada tempat penelitian dilaksanakan. Penulis melakukan pengamatan langsung dan mencatat suatu gejala yang tampak pada objek yang diteliti sebagai sarana pengumpulan data, seperti pengamatan terhadap Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Tanap.

b. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan dengan berbagai cara tergantung dari kondisi saat wawancara dilakukan agar memperoleh data yang diinginkan oleh peneliti. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur yaitu pada saat wawancara penulis hanya membawa panduan pertanyaan secara garis besar saja yang diajukan ke informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan semua bahan-bahan atau data-data tertulis dan melalui alat perekam yang dapat digunakan untuk melengkapi data sehingga dapat memperoleh data yang komprehensif.

## 6. Instrumen atau Alat Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dengan melakukan observasi dan wawancara serta dibantu dengan pedoman wawancara atau checklist. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya. Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1) Pedoman observasi, yaitu akan mengamati langsung di lapangan dan membahas mengenai pengimplementasian kebijakan dana desa di Desa Tanap. Dalam hal ini, sebelumnya penulis akan membuat langkah-langkah dalam melakukan pendekatan langsung kepada subjek dan objek yang akan diteliti. Alat pengumpulan data dalam observasi adalah dengan panduan observasi (Check list), yaitu kumpulan atau deretan daftar objek yang akan diteliti atau diamati berkaitan dengan masalah penelitian.

2) Pedoman wawancara, penulis akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada saat wawancara dengan informan atau narasumber. Alat

pengumpulan data yang digunakan dalam wawancara adalah pedoman wawancara yang telah dibuat atau dirancang sebelum melaksanakan wawancara langsung kepada subjek penelitian. Kemudian dibantu alat-alat yang mendukung hasil wawancara seperti buku catatan untuk mencatat hasil dari sumber data.

3) Dokumentasi, yaitu alat-alat yang digunakan penulis untuk membantu dan mempermudah pengumpulan data. Alat pengumpulan data dalam dokumentasi berupa arsip – arsip, dokumen dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 7. Analisis Data

### a. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, maka data yang diterima terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan datanya. Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang dilakukan oleh penulis adalah teknik triangulasi sumber.

Triangulasi sumber dilaksanakan dengan cara membandingkan dan melakukan pengecekan kembali, data hasil wawancara dengan cara membandingkan dan melakukan pengecekan kembali data hasil wawancara, dengan data hasil observasi.

### b. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2016: 244) menyatakan bahwa analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga tahap yaitu:

1) Peringkasan data/reduksi data (data reduction)

Reduksi data dilakukan dengan tujuan untuk merangkum data, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk mencari tema dan polanya, memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencari data tersebut jika kembali diperlukan.

2) Penyajian data (data display)

Penyajian data akan mempermudah penulis untuk mengetahui apa gambaran yang terjadi, merencanakan langkah berikutnya dalam penelitian, dan mempermudah dalam mengambil kesimpulan.

3) Penarikan kesimpulan (verification)

Kesimpulan awal yang dilakukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi bila didukung dengan data – data dan bukti yang valid dilapangan selama pelaksanaan penelitian maka kesimpulan yang dikemukakan dapat menjadi kesimpulan yang kredibel.

## **D. HASIL PENELITIAN**

### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses menjalankan suatu kebijakan, dengan komunikasi yang baik maka suatu kebijakan juga akan diterima oleh pelaku kebijakan secara benar tanpa adanya ambiguitas dalam memaknai kebijakan tersebut. Dengan komunikasi maka seluruh informasi yang berhubungan dengan kebijakan Dana Desa (DD) dapat diterima dengan baik oleh pelaksana kebijakan itu sendiri atau dalam hal ini adalah Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau.

Tujuan dari Dana Desa (DD) selain membantu pembangunan yang ada di desa adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, tentunya pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang bertujuan membangun masyarakat setempat seperti untuk kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan adanya pelayanan yang maksimal

yang didukung oleh dana yang memadai atau dibantu dari Dana Desa (DD) maka akan dipastikan hasil yang didapatkan juga maksimal sesuai yang diharapkan.

Penyampaian informasi sangat memegang peranan penting dalam mentransmisikan suatu kebijakan, karena apabila informasi yang diberikan masih kurang, tidak berkesinambungan dan tidak jelas akan berpengaruh terhadap kesamaan persepsi dalam menindaklanjuti suatu kebijakan tersebut bahkan dapat dipastikan juga kemungkinan pertentangan-pertentangan, perbedaan tidak dapat terhindar yang juga dapat mengakibatkan pandangan terhadap suatu kebijakan Dana Desa (DD) menjadi sangat banyak. Jadi, dalam komunikasi mentransmisikan kebijakan Dana Desa (DD) antara aparat desa dan masyarakat desa belum dilakukan dengan baik.

Sampai dengan saat ini aparat desa terus mengusahakan dengan maksimal dalam melaksanakan kebijakan terkait Dana Desa (DD) di Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau ini. konsistensi dalam kebijakan Dana Desa (DD) masih kurang. Hal ini dapat memicu perbedaan pendapat di kalangan masyarakat terhadap perilaku aparat desa, karena aparat desa yang kurang terbuka mengenai kebijakan Dana Desa (DD) terhadap masyarakat.

### **2. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan unsur yang terdiri atas sumber daya manusia dan sumber daya non manusia, yang secara nyata dan potensial dapat digunakan untuk meningkatkan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan itu sendiri. Secara khusus, sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting karena manusia sendiri sangat mudah dipengaruhi oleh faktor luar maupun dalam sehingga dalam menjalankan suatu kebijakan sangat perlu adanya pengalaman baik dari dalam maupun dari luar, ditambah lagi sifat-sifat manusia yang terkadang bisa berubah saat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan ekonomu. Dalam suatu implementasi kebijakan menurut Teori Edward III Sumber Daya terdiri dari Staf, Keuangan, Perlengkapan, Informasi, dan Wewenang.

Dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Dana Desa (DD) di Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, maka keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan tugas sangatlah penting dan hal tersebut tergantung kepada keberadaan staf yang ada di Desa Tanap. Salah satu indikator penting dalam mengukur kesiapan sumber daya manusia (staf) adalah melihat tingkat pendidikan staf itu sendiri.

Selain dipengaruhi oleh sumber daya manusia (staf), aspek penting dalam implementasi kebijakan Dana Desa (DD)

adalah aspek keuangan, karena suatu kebijakan sangat tidak mungkin dapat dilaksanakan jika tanpa adanya dukungan dana.

Berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan APBD Semesteran Pemerintah Desa Tanap Tahun Anggaran 2020, pendapatan berjumlah Rp1.484.503.850,80 dengan belanja berjumlah Rp1.634.789.753,60. Belanja desa terbagi menjadi beberapa bidang, yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan, bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa. Setiap bidang sudah dialokasikan anggaran sesuai keperluan masing-masing bidang.

Selain sumber daya manusia dan sumber daya keuangan, sumber daya perlengkapan atau sarana dan prasarana yang memadai merupakan aspek yang sangat penting dalam mengimplementasikan.

Sumber daya perlengkapan/peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan pengamatan penulis secara langsung pada saat penelitian dan

berdasarkan wawancara di lapangan, memang keadaan sarana dan prasarana yang ada di Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau masih sangat kurang, seperti belum adanya ruangan khusus untuk sekretaris desa, komputer dan beberapa buah laptop yang disediakan dalam keadaan rusak, serta printer yang sama sekali tidak dapat digunakan.

Sumber daya informasi merupakan salah satu aspek penting lainnya dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa (DD). Tidak ada satupun organisasi yang tidak memerlukan suatu komunikasi yang baik dan jelas dalam menjalankan kebijakannya, karena komunikasi juga merupakan salah satu toak ukur suatu kebijakan dapat diterima dan diserahkan dengan baik. Bahkan dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa (DD) dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban memerlukan komunikasi yang intensif antara pengambil kebijakan dan sesama pelaksana kebijakan itu sendiri contohnya antara Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berkaitan dengan sumber daya informasi, maka hal yang sangat penting untuk terus dipertahankan adalah bagaimana komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan itu sendiri, tujuannya supaya apa yang

dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa sebagai pengambil kebijakan berkewajiban memberikan informasi yang jelas terhadap desa agar kebijakannya dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada dengan menggunakan berbagai media dan teknologi tidak hanya lisan dan formal.

### **3. Disposisi**

Disposisi adalah kecenderungan dari para pelaksana kebijakan yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, maka kemungkinan besar menjadi adanya dukungan dalam pelaksanaan kebijakan sebagaimana diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku para pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Disposisi boleh dikatakan merupakan watak dan sifat yang dimiliki pelaksana kebijakan seperti kejujuran, komitmen, dan keterbukaan.

### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Edward, ada dua

karakteristik utama struktur organisasi, yakni prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut dengan *Standart Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.

Menurut Winarno (2005:208) menyatakan SOP adalah

“Penyeragaman tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar (orang dapat dipindahkan dengan mudah dari suatu tempat ke tempat lain) dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan”.

Dari pernyataan di atas dapat diartikan bahwa *Standart Operating Procedures* (SOP) yang fleksibel dengan control yang maksimal apabila dikaitkan dengan implementasi kebijakan maka akan mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan Dana Desa (DD) di Desa Tanap.

Desa Tanap belum memiliki *Standart Operating Procedures* (SOP) dengan beberapa alasan. Alasan belum adanya *Standart Operating Procedures* (SOP) di Desa Tanap yaitu karena kesejahteraan perangkat desa yang ada di Desa Tanap masih sangat jauh dari apa yang diharapkan sehingga mereka tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, salah satunya belum membuat *Standart Operating Procedures* (SOP).

Berdasarkan pengamatan secara langsung penulis di lapangan selama melakukan penelitian bahwa di Kecamatan Kembayan masih banyak desa yang harus didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan untuk melaksanakan kebijakan Dana Desa (DD), namun oleh karena tenaga yang terbatas yang ada di Kecamatan Kembayan maka terkadang koordinasi antara desa dan kecamatan cukup sulit dan juga pada tahap pembinaan tidak semua desa yang ada di Kecamatan Kembayan bisa dikunjungi dalam satu tahun, mengingat kondisi jalan juga cukup rusak, waktu dan tenaga yang terbatas serta minimnya dana yang ada di kecamatan.

## **E. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Tanap. Didapatkan beberapa simpulan sebagai berikut:

1). Komunikasi dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

#### **a. Aspek Transmisi**

Dilihat dari aspek transmisi, kebijakan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Desa Tanap ke masyarakat Desa Tanap belum tersampaikan dengan maksimal karena kurang diadakannya rapat desa.

#### **b. Aspek Konsistensi**

Dilihat dari aspek konsistensi, pemerintah Desa Tanap konsistensi

dalam kebijakan Dana Desa (DD) masih kurang. Hal ini dapat memicu perbedaan pendapat di kalangan masyarakat terhadap perilaku aparat desa, karena aparat desa yang kurang terbuka mengenai kebijakan Dana Desa (DD) terhadap masyarakat.

c. Aspek Kejelasan

Dilihat dari aspek kejelasan, petunjuk teknis penetapan adanya Dana Desa (DD) telah dilaksanakan sesuai dengan keputusan Bupati Sanggau.

2). Sumber Daya dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

a. Aspek Sumber Daya Manusia (Staf)

Dilihat dari aspek sumber daya manusia/ staf di Desa Tanap pada umumnya sudah mampu menjalankan tugasnya untuk melaksanakan kebijakan Dana Desa (DD) dengan cukup baik, tetapi juga masih diperlukan peningkatan melalui Pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis bagi Kepala Desa beserta perangkat desa lainnya.

b. Aspek Sumber Daya Keuangan

Dilihat dari aspek sumber daya keuangan yang ada di Desa Tanap, Dana Desa (DD) sudah dianggarkan masing-masing pada bidang sesuai kebutuhan di Pemerintah Desa Tanap.

c. Aspek Sumber Daya Perlengkapan

Dilihat dari aspek sumber daya perlengkapan, salah satu penyebab

utama tidak maksimalnya pelaksanaan kebijakan Dana Desa (DD) di Desa Tanap adalah disebabkan oleh tidak memadai dan kurangnya perlengkapan atau sarana prasarana yang dibutuhkan di Desa Tanap.

d. Aspek Sumber Daya Informasi

Dilihat dari aspek sumber daya informasi, penyampaian informasi yang dilaksanakan pengambil kebijakan dan instansi sehingga penyampaian informasi dan dalam melaksanakan informasi di Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau tidak ditemukan permasalahan dan penyimpangan yang berarti.

e. Aspek Sumber Daya Kewenangan

Dilihat dari aspek sumber daya kewenangan, Desa Tanap sudah memiliki uraian tugas sebagai panduan, di Desa Tanap namun dibuat dalam bentuk struktur organisasi saja.

3). Dilihat dari aspek disposisi, seluruh bagian pemerintah desa, baik Kepala

Desa maupun Perangkat Desa di Desa Tanap menerima dan mendukung implemmentasi kebijakan Dana Desa (DD) di Desa Tanap.

4). Dilihat dari aspek struktur birokrasi/organisasi, Desa Tanap

belum memiliki *Standart Operating Procedures* (SOP) berkaitan dengan kebijakan Dana Desa (DD) sehingga tidak ada standarisasi dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga tidak efektif dan efisien. Selain itu, juga terjadi fragmentasi organisasi.

## 2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka ada beberapa saran penting yang diajukan, yaitu:

- 1) Peneliti mengharapkan agar penelitian di Desa Tanap dapat dilanjutkan dan diperbaiki oleh peneliti selanjutnya di kemudian hari.
- 2) Peneliti mengharapkan dana desa di Desa Tanap dapat dimanfaatkan lebih maksimal oleh Pemerintah Desa Tanap serta disalurkan dengan baik.
- 3) Peneliti berharap agar penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan untuk peneliti selanjutnya dalam kajian ilmu administrasi publik khususnya mengenai kebijakan dana desa.

## F. REFERENSI

- A. G. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- A. G. Subarsono. 2009. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustinus, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.

Sugiyono. 2016. Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

Sukardi. 2014. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta: Bumi Aksara.

Surmayadi, Nyoman. I. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama.

Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2005. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo. Dokumen: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.